

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara penulis dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait dengan bagaimana proses Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang dianalisis dengan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang berjalan kurang efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi program ini adalah perilaku implementor yang masih tidak patuh dalam menjalankan program sesuai dengan Kebijakan/Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan. Dilihat dari sisi *compliance* atau kepatuhan, implementor banyak tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk program, khususnya pengurus dan pengelola yang tidak menjalankan tahapan-tahapan program sesuai dengan ketentuan kebijakan program. Ketidapatuhan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman implementor tersebut mengenai program.

Sedangkan dilihat dari variabel *what's happening* yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yaitu dilihat dari indikator *number and identity* adalah meski implementor telah mencukupi namun dalam pelaksanaan tupoksi itu sendiri implementor belum melaksanakannya dengan maksimal. Pada indikator *The Role Of*

Interest Group adanya keterlibatan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan koperasi jasa keuangan syari'ah baitul maal wat tamwil kelurahan umumnya serta khususnya pada kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung Padang ini..

Dari segi indikator *Lock of Hierarchy* (Ketiadaan Hirarki), garis hirarki baik implementor dengan implementor ataupun implementor dengan *target group* sudah jelas namun tetap dalam proses pelaksanaan cenderung terjadi permasalahan, khususnya hierarki antara implementor dengan masyarakat individu penerima pembiayaan. Dari segi *The Multiplicity and Vagueness of Goals* (Kejelasan Tujuan) para implementor memahani akan kejelasan tujuan dari kebijakan pelaksanaan program KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang khususnya pada Kecamatan di Lubuk Begalung. Oleh karena itu peneliti menilai bahwa panduan pelaksanaan program KJKS BMT Kelurahan khususnya sasaran dan tujuan program ini telah dirumuskan dengan baik, sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh implementor.

Kemudian untuk indikator *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (Perkembangan dan Kerumitan Program), ditemukan bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung diatur oleh panduan pelaksanaan yang jelas dan koordinasi yang cukup baik sehingga tingkat kerumitan program tidak terlalu tinggi dan mampu dimengerti oleh implementor secara baik.

. Sedangkan dalam hal *The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan) ditemukan bentuk dukungan adalah bentuk kerjasama untuk saling membantu dalam mencapai keberhasilan program. Peneliti menilai bahwa tingkat partisipasi semua unit pemerintahan di Kota Padang dalam

implementasi program KJKS BMT Kelurahan ini pada tahun 2014 ini baik karena melibatkan hampir semua jajaran pemerintahan.

Pengaruh eksternal yang di luar kendali implementor (*The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation*), juga sangat memberikan pengaruh terhadap kesuksesan penanggulangan kemiskinan, dimana bagi implementor sendiri dana merupakan hal paling penting yang mempengaruhi implementasi program. Kekurangan dana selalu menjadi masalah pada setiap pelaksanaan program KJKS BMT Kelurahan khususnya tahun 2014 dan 2015 dimana tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun dengan pengalokasian dana tunggakan yang cukup besar dan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Faktor tidak terkendali dalam pelaksanaan program KJKS BMT Kelurahan ini adalah kurangnya dana untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan koperasi jasa keuangan syariah baitu maal wat tamwil kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung Di Kota Padang. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian sosialisasi pada calon penerima pembiayaan, baik dalam bentuk berkelompok atau individu mengenai program sebaiknya lebih dititik beratkan kepada tim pengelola, disebabkan pengelola sebagai implementor yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan target group bisa lebih paham dan mengerti akan ketentuan-ketentuan program beserta tupoksi mereka serta lebih profesional dalam membina dan membimbing anggota koperasi yang ingin pembiayaan dan calon masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan.

2. Perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap pengurus dan pengelola maupun masyarakat sebagai target group penerima pembiayaan serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan dan ketidakpatuhan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.

Perlunya ketegasan dan kejelasan aturan mengenai sanksi terhadap masyarakat yang yang melanggar aturan ataupun tidak mengindahkan prosedur persyaratan pembiayaan serta juga diberikan sanksi terhadap implementor yang mengabaikan pembiayaan tanpa prosedur.

